

**SAMBUT DAN JAGA KEUTUHAN INDONESIA 2045:
Revolusi Kembali Ke Sistem Ekonomi Pancasila
& Tolak Sistem Ekonomi Neoliberal
Oleh Dr Alexander Jebadu
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Flores**

Kunci Supaya Tetap Utuh dan Bisa Sejahtera

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia telah menerbitkan buku berjudul *Indonesia Menuju 2045: SDM Unggul dan Teknologi Adalah Kunci* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021). Buku ini kemudian dilengkapi dua buku lain yang disusun oleh Para Penulis Harian Kompas dengan judul *Indonesia Menuju 2045: Catatan Kompas – Wacana Menuju Kesejahteraan Bersama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021) dan oleh CSIS (Centre for Strategic International Studies) Indonesia dengan judul *Indonesia Menuju 2045: Mencapai Kemajuan Ekonomi Berbasis Inovasi dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021).

Ketiga buku ini diterbitkan dalam rangka menyambut Indonesia yang akan merayakan satu abad alias 100 tahun kemerdekaanya dari eksploitasi bangsa-bangsa asing terhadap sumber-sumber ekonominya, baik di atas tanah maupun di bawah tanah, baik di darat maupun di laut, di seluruh Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Marauke. Lemhanas, CSIS dan PT Kompas telah bahu-membahu bekerja bagaimana bangsa Indonesia menyambut dan menghadapi tahun 2045 ketika bangsa Indonesia nanti merayakan ulang tahun ke-100 sebagai bangsa yang sumber-sumber hidupnya tidak dieksploitasi oleh bangsa-bangsa asing.

Ketiga buku ini akan dibedah dalam sebuah Webminar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 jam 10.00 -13.00 Waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan ini, saya merasa bergangga karena saya diundang untuk ikut membedah ketiga buku ini dalam Webminar yang telah direncanakan. Untuk saya, ini merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan.

Ketiga buku tiba di alamat saya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dan sejak hari itu mulai membacanya satu per satu secara marathon siang dan malam hingga hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Menurut saya, Lemhanas, CSIS dan Para Penulis Harian Kompas telah mampu menangkap apa yang merupakan tantangan dan kerisauan anak-anak Ibu Pertiwi Indonesia dari Sabang sampai Marauke sejak nenek moyang suku mereka menyatakan diri tidak mau dieksploitasi lagi oleh bangsa-bangsa asing pada tahun 1945 hingga tahun 2021 yang masih sedang berjalan ini.

Lemhanas, CSIS dan Harian Kompas melalui ketiga buku ini merancang program-program strategis yang harus dibuat untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang sedang dihadapi bangsa ini sehingga pada Hari Ulang Tahun ke-100 kemerdekaanya dari eksploitasi ekonominya oleh bangsa-bangsa asing, bangsa Indonesia sungguh tetap menjadi satu bangsa yang utuh, kuat, berdaulat, makmur, adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia seperti dicita-citakan para pendiri bangsa ini pada tahun 1945 seperti tercermin dalam Pancasila dan UUD45. Tanpa mengulangi detail presentasi yang telah digulirkan oleh Lemhanas, CSIS dan Harian Kompas di

dalam ketiga buku ini, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sejak di dalam kandungan untuk menghindari, antara lain, masalah *staunting* yang akut hingga pendidikan anak-anak Indonesia sejak PAUD hingga Perguruan Tinggi dan penguasaan teknologi 4.0.

Alhasil, pada tahun 2045, yaitu pada hari ulang tahun ke 100 penyelamatan dirinya dari belenggu eksploitasi sumber-sumber ekonominya oleh bangsa-bangsa asing, Indonesia akan tetap utuh, kuat, berdaulat dan adil serta seluruh rakyatnya, dari Sabang sampai Marauken, apapun suku, agama, ras atau daerahnya, akan makmur dan sejahtera. Bukan tak mungkin. Kalau bangsa ini nekat, tidak egoistik, tidak dikuasai ketamakan (*greed*) dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok suku atau kepentingan kelompok agama, kepentingan suku tertentu atau kepentingan partai politik, kepentingan oligarki atau kepentingan kelompok konglomerat, hal itu bukan tak mungkin.

Sadari Sistem Ekonomi Asing Yang Telah Diselingkuhi

Pada dasarnya, saya setuju semua rencana strategis yang didesain Lemhanas ini. Saya tidak membantah satu poin atau satu program pun yang telah diusulkan Lemhanas, CSIS dan Harian Kompas dalam ketiga buku ini sebagai jembatan-jembatan untuk mencapai Indonesia yang tetap utuh, kuat, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke apapun suku, agama dan rasnya. Akan tetapi menurut saya, masih ada satu mhal yang kurang. Ada satu masalah yang mendera bangsa Indonesia selama ini dan yang membuatnya rapuh yang belum dipresentasikan Lemhanas, CSIS dan Harian Kompas, yaitu fakta bahwa Indonesia sudah sekian jauh dijajah kembali secara baru melalui sebuah sistem ekonomi asing yang bertentangan dengan sistem ekonomi kita sendiri. Sistem ekonomi asing itu adalah sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang telah diselingkuhi pemerintah negara ini sejak tahun 1980-an.

Sebelum saya mengelaborasi apa yang dimaksudkan di atas, perlu saya tandaskan bahwa ikut membedah membedah desain Menuju Indonesia 2045 yang dipresentasikan Lemhanas ini dalam kapasitas saya sebagai 100% warga negara Indonesia dan sebagai seorang pemikir Gereja Kristen Katolik. Saya, karenanya, akan menyoroti tantangan, peluang dan mimpi-mimpi menuju Indonesia 2045 ini dalam terang Ajaran Sosial Gereja Gereja tentang ekonomi dan politik yang lasim disebut *Catholic Social Teaching* atau *Catholic Social Doctrine*.

a) Ajaran Sosial Gereja tentang Ekonomi, Politik dan Negara

Pada dasarnya, Ajaran Sosial Gereja tentang hakikat ekonomi, politik dan negara sangat luas dan kompleks seluas hakikat ekonomi, politik dan negara itu sendiri. Akan tetapi, pada intinya, Gereja Kristen Katolik akan berada pada posisi akan mendukung setiap program pembangunan ekonomi, sosial dan politik sejauh semuanya dibuat dengan adil, demokratis, ramah lingkungan, berkelanjutan dan menghormati martabat pribadi manusia. Pembangunan apapun tidak bisa ditempuh dengan cara-cara tidak benar termasuk dengan menginjak dan mengorbankan martabat pribadi manusia.

Negara dan pemerintah negara dibentuk untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan bersama seluruh warga negara sebagai satu keluarga negara bangsa (*bonum commune*) dan membela dan memihak kepentingan seluruh rakyat terutama yang lemah dan yang miskin. Pemerintah negara demokratis, karena telah dipilih oleh rakyat untuk atas nama mereka menyelenggarakan kesejahteraan bersama tidak bisa mendelegasikan tugas mencapai kesejahteraan bersama rakyat ini (*bonum commune*) kepada pihak swasta. Penyerahan aset-aset ekonomi negara milik seluruh rakyat yang diserahkan kepada perusahaan swasta dalam negara atau dari luar negeri, karenanya, menurut Ajaran Sosial Gereja Katolik, bertentangan dengan hakikat negara demokratis.

Gereja Katolik menolak sistem ekonomi kapitalisme liberal yang pada prinsipnya memutlakkan kebebasan pribadi untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi di dalam negara atau di manapun di seluruh planet bumi melalui perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya tanpa batas. Pada saat yang sama, Gereja Katolik juga menolak sistem ekonomi sosialis/komunis yang memutlakkan kekuasaan pemerintah negara untuk menguasai dan mengatur semua sumber-sumber ekonomi dalam sebuah negara dan menghapus hak-hak ekonomi pribadi dari setiap warga negara.

Menurut Gereja Katolik, manusia adalah makhluk pribadi dan sosial sekaligus. Oleh karena itu, sebagai makhluk pribadi, setiap pribadi manusia mesti ada hal-hal yang bisa diatur secara pribadi dan dimiliki secara pribadi untuk kebutuhan dan kesejahteraan pribadi. Sebaliknya sebagai makhluk sosial, ada hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama dan karena itu harus diatur dan dikelola bersama yang didelegasikan kepada pemerintahan negara untuk kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai idealisme manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial sekaligus, Gereja Katolik mendukung sistem ekonomi campuran (*mix-economic system*), sistem ekonomi jalan tengah (*middle way economic system*) atau sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat (*Democratic Economic System*), yang pada intinya mengajarkan bahwa semua aset ekonomi, yang vital karena sangat menguasai hayat hidup orang banyak, mesti dikuasai dan dikelola oleh pemerintah negara untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat dari sebuah negara. Sedangkan sumber-sumber ekonomi lain yang tidak vital karena tidak menguasai hayat hidup orang banyak boleh diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta.

b) Indonesia Menganut Sistem Demokrasi Ekonomi

Persis sistem ekonomi demokrasi yang difavoritkan Gereja Katolik juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang diadopsi oleh pendiri bangsa Indonesia sejak tahun 1945 seperti yang terpatir di dalam UUD45 pasal 33. Lalu sistem ekonomi ini yang dipertahankan oleh Presiden Sukarno negara Indonesia sejak 17 Agustus 1945 dan menjadi sebab mengapa ia dilengserkan melalui sebuah kudeta misterius pada tahun 1965 oleh sekelompok orang Indonesia yang tidak setia pada sistem ekonomi demokrasi menurut UUD45 Pasal 33 dalam kerjasama dengan pemerintah negara-negara industri Eropa dan korporasi swasta transnasional

mereka yang ingin menjajah kembali negara-negara berkembang. Penjajahan kembali secara baru ini dibuat dengan menata kembali ekonomi dunia pada tahun 1944 dalam sebuah Konferensi Ekonomi Internasional di New Hampshire, New York, yang dikenal dengan Tata Ekonomi Dunia Baru (New World Economic Order). Hal ini ditandai dengan didirikannya tiga lembaga ekonomi dunia: Bank Dunia, IMF, GATT/WTO.

Sukarno, yang pandangannya sangat tajam dan kritis, tak tanggung-tanggung, menyebut Tata Ekonomi Dunia Baru yang lahir pasca Perang Dunia II ini sebagai sebuah bentuk penjajahan baru (neokolim atau neokolonialisme). Selama kepemimpinannya, Sukarno dengan gigih melawan penjajahan baru ini. Kepada IMF yang menawarkan pinjaman dengan agenda tersembunyi dalam rangka menguasai Indonesia Sukarno tak segan mengumpatnya: “Persetan dengan bantuanmu” (*Go to hell with you aid*)! Akan tetapi penjajahan baru ini akhirnya tembus masuk menimpa Indonesia pada waktu rezim Orde Baru ambil alih kekuasaan hingga Era Otonomi Daerah saat ini.

Tanpa disadari oleh mayoritas rakyat Indonesia, Indonesia telah dijajah kembali secara baru sejak tahun 1980-an melalui sistem ekonomi neoliberal alias sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali yang telah diselingkuhi pemerintah Indonesia. Penjajahan baru ini tampak sangat jelas dari judul karya Awalil Risky dan Nasyith Majidi *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia* (2008) atau judul karya Wawan Tunggal Alam *Di Bawah Cengkeraman Asing: Membongkar Akar Persoalan dan Tawaran Revolusi untuk Menjadi Tuan di Negeri Sendiri* (2009).

Menurut saya, untuk membangun Indonesia yang kuat dan mandiri di bidang politik luar negeri dan di bidang ekonomi dan budaya, bangsa Indonesia mesti menyadari bahwa pembangunan Indonesia, sejak rezim Orde Baru merebut kekuasaan pada tahun 1965, tidak terlepas dari pengaruh politik dunia yang pada intinya negara-negara industri telah berhasil menjajah kembali bangsa-bangsa lain yang pernah dijajahnya secara terbuka selama 5 abad di masa lalu melalui sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali yang saat ini lasim disebut kapitalisme neoliberal. Entah sadar atau tidak sadar, pemerintah Indonesia telah berselingkuh dengan sistem ekonomi ini, sebuah sistem ekonomi yang bukan merupakan sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia seturut Konstitusi 1945 Pasal 33.

c) Kontrak Sosial Ekonomi dan Politik Bangsa Indonesia Tahun 1945

Tanpa bermaksud terlalu meringkas sejarah panjang dan kompleks dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),¹ tujuan 200-an suku di Kepulauan Nusantara bersatu menjadi satu bangsa, satu saudara, satu keluarga dan satu negara pada tahun 1945 adalah agar 200-an suku ini bisa bersatu mempertahankan sumber-sumber ekonomi – hutan, mineral, air, dan lain-lain – di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara, baik di darat maupun di laut, baik di atas tanah maupun di dalam tanah, supaya selamanya tidak dieksploitasi, atau dalam bahasa yang lebih lugas, supaya

¹ Materi ini sebagian besar diambil dari Dr Alexander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme: Kritik Kenabian Terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2021) khususnya Bab 7 dengan judul ‘Pancasila dan Prahara Sistem Ekonomi Pasar Bebas,’ hal. 80-108.

tidak *dijarah* lagi oleh bangsa-bangsa lain seperti yang sudah terjadi selama 5 abad penjajahan oleh bangsa-bangsa lain dari tahun 1511-1945.

Pancasila Jatidiri Bangsa Indonesia

Pada tahun 1945 suku-suku dari Kepulauan Nusantara bersepakat untuk mempunyai satu cita-cita yaitu membangun kerjasama untuk mencapai sebuah bangsa yang adil, makmur dan sejahtera baik rohani maupun jasmani seperti yang secara padat dirumuskan oleh ideologi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak lain dari siapa, dari mana, bagaimana dan ke mana kita sebagai satu bangsa sedang berlangkah. Pancasila menjadi intisari dari jatidiri kita sebagai bangsa yaitu tentang asal, eksistensi dan tujuan 200-suku di Kepulauan Nusantara berbangsa dan bernegara.

Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bahwa: 1) kita adalah makhluk yang mengenal dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai asal dan sumber segala sesuatu termasuk manusia (*Believe in one God*); 2) oleh kehendak Allah yang satu dan sama dalam Sila Pertama itu, orang Indonesia mesti menjadi manusia yang adil dan beradab (*Civilized and just humanity*); 3) untuk mencapai cita-cita bersama pertahankan hak-hak hidup dan sumber-sumber ekonomi serta mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara, sebagai bangsa yang adil dan beradab menurut Sila Kedua, kita perlu bersatu (*the Unity of Indonesia*); 4) dalam kesatuan sebagai bangsa dari Sila Ketiga untuk mencapai cita-cita bersama sebagai manusia yang adil dan beradab, kita perlu bekerjasama pertahankan hak-hak atas hidup dan mengejar cita-cita bersama melalui musyawarah perwakilan (*Democracy*); dan 5) kita bercita-cita untuk mencapai keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia (*Social justice for all Indonesian people*).

Untuk mencapai cita-cita dengan proyek besar ini maka diperlukan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan sistem demokrasi, yang pada dasarnya berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang didelegasikan kepada pengurus negara yang dipilih melalui sistem pemilu dan dikelola dengan mekanisme *Trias Politica* – eksekutif, legislatif dan yudikatif – dengan model sentralisasi (1945-1998) atau desentralisasi (1999-sekarang). Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu terutama kekuasaan yang berhubungan dengan rencana pembangunan ekonomi dan rencana pengelolaan seluruh sumber daya alam dan pemerataan pemanfaatannya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Masalah Sosial Ekonomi Yang Menantang Indonesia

Dalam pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia selama 75 tahun merdeka sejak tahun 1945 hingga tahun 2020, walaupun ada sejumlah kemajuan, ada beberapa tantangan berat yang membuat mimpi Pancasila dan UUD45 menjadi semakin jauh dari kenyataan dan yang menurut saya merupakan buah langsung dari perselingkuhan dengan sistem ekonomi kapitalis liberal oleh pemerintah negara ini sejak Orde Baru. Tantangan dan sekaligus buah pahit dari selingkuhan dengan sistem ekonomi asing itu adalah ketimpangan yang semakin lebar antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin (*inequality between the few rich and majority poor*), urbanisasi (*urbanization*), pelanggaran hak asasi manusia (*human right violation*), korupsi yang merajalela

(*rampant public corruption*) dan serbuan perusahaan-perusahaan asing (*the invasion of transnational corporations*).

1. Jurang semakin lebar antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin

Dari segi sumber daya alam, Indonesia termasuk negara yang sangat kaya di planet bumi ini. Akan tetapi ironinya adalah hingga hari ini ia masih dikategori sebagai negara berkembang alias miskin. Sekitar 50% penduduknya hidup di bawah garis miskin US\$2 per hari.² Sebagian besar kekayaan alam di pulau-pulau besar – Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Jawa – sudah dieksploitasi selama berpuluh-puluh tahun bahkan sudah berabad-abad lamanya. Namun semuanya ini hanya memperkaya segelintir orang kaya melalui perusahaan-perusahaan mereka sebagai instrumennya, baik perusahaan swasta dalam negeri maupun transnasional dari negara-negara industri maju.

Sehubungan dengan gap antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin di Indonesia ini, Majalah *Forbes* melaporkan bahwa pada tahun 2013, sebanyak 25 orang dari 1.426 billionaire dunia merupakan orang Indonesia dan jumlahnya menduduki posisi ke 12 di dunia dari jumlah total orang sangat kaya di dunia.³ Menurut Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto, pada tahun 2019 1% orang kaya RI kuasai 50% aset nasional.⁴ Itu artinya, dari 270.000.000 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 2,7 juta orang mengkonsumsi setengah dari aset ekonomi NKRI. Atau hal itu sama dengan dari 100 orang anak SD, 10 orang dari mereka mengkonsumsi setengah dari sebuah kue tar dan setengah kue tar itu dibagi sedikit-sedikit dalam bentuk remah kepada 90 orang siswa SD yang lain. Sangat tidak adil. Tapi ketidakadilan inilah yang dicapai Indonesia selama 75 tahun merdeka dari penjajah Belanda. Menuju Indonesia 2045 yang kuat, utuh dan maju, ketidakadilan sosial ekonomi tidak bisa diterima. Jika tidak diperangi sejak sekarang, ia bisa menggoyahkan eksistensi NKRI.

2. Urbanisasi dan ketidakadilan regional

Hingga hari ini Indonesia masih dikategori sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian. Namun ironinya, lebih dari 50% penduduknya sudah hidup di seluruh Indonesia (52.5% pada tahun 2015) dibandingkan dengannya 26.2% penduduknya yang hidup di kota pada tahun 1985, 35.4% pada tahun 1995 dan 40.7% pada tahun 2000.⁵ Menurut *Index Mundi*, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 248 juta pada tahun 2013⁶ yang berarti lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1971 yang hanya

² Handayani P.Iin, “Beyond Statistics of Poverty” diterbitkan oleh *The Jakarta Post* online February 13, 2012 dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/13/beyondstatistics-poverty.html> (akses 10/6/2013).

³ Informasi lanjut lihat Kroll Luisa, “Mapping the Wealth of the World’s Billionaires” dalam <http://forbes.com/sites/luisakroll/2013/03/09/mapping-the-wealth-of-the-worlds-billionaires/> (akses 7/6/2013)

⁴ Egi Adyatama, “Survey: 1 Persen Orang Kaya RI Kuasai 50 Persen Aset Nasional”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1257730/survei-1-persen-orang-kaya-ri-kuasai-50-persen-aset-nasional> (akses 13/8/2021)

⁵ Firman Tommy, “Urbanization and urban development patterns” dalam *The Jakarta Post*, 12th of May 2012.

⁶ INDEX Mundi, “Index Indonesia Demographics Profile 2013,” dalam http://www.indexmundi.com/indonesia/demographics_profile.html (akses pada 15/6/2013).

berjumlah 119 juta jiwa.⁷ Selain itu, 60% penduduk Indonesia telah terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 7% dari total seluruh wilayah daratan Indonesia.⁸

Selain kesenjangan sosial ekonomi dan pembangunan, secara keseluruhan di Indonesia terjadi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa serta Indonesia bagian barat yang lebih maju dan makmur di satu pihak dan Indonesia bagian timur yang masih relatif terbelakang di pihak lain. Di Indonesia, Jawa hampir identik dengan kemajuan dan modernitas. Semua Universitas yang dianggap terbaik, Rumah Sakit terlengkap, Gedung Pencakar Langit, Jalan Raya Bebas Hambatan (*Toll* atau *High Way*), Mega Mall hanya bisa dijumpai di Jawa dan situasi di luar Jawa adalah sebaliknya.⁹ Kategori Jawa versus luar Jawa adalah kategori yang bisa mencabik kesatuan bangsa dan arena itu perlu dikotaksampahkan.

3. Korupsi publik yang merajalela

Masalah ketiga yang menantang bangsa Indonesia adalah korupsi publik, yang secara konvensional didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi.¹⁰ Walaupun Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara yang korup di dunia, tapi bangsa ini telah didaftar sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Pada tahun 1998, tahun kejatuhan regim Suharto, *Transparency International's Corruption Perception Index* (TPCPI) menempatkan Indonesia pada urutan ke 80 dari 85 negara dengan skor 2.0 pada skala 0.0 sebagai negara paling korup dan 10.0 sebagai negara yang paling bersih dari korupsi.¹¹ Tahun 2014 Indonesia menduduki rangking 107 dari 174 negara dengan skor 3.2.¹²

Tahun 2019 Indonesia menduduki rangking 80 dari 180 negara dengan skor 4.0.¹³ Itu artinya, selama hampir 20 tahun era reformasi, bangsa Indonesia tetap belum bisa bertobat dari dosa korupsi. Kalau diibaratkan dengan seorang mahasiswa, maka itu artinya Indonesia masih belum bisa lulus ujian untuk bertobat dari korupsi selama hampir 20 tahun karena hanya menyandang nilai tertinggi 4.0. Bagi seorang mahasiswa di perguruan tinggi, nilai rendah ini

⁷WIRYONO Bengkulu, "The reason why we should control population growth" dalam *Jakarta Post*, February 22, 20013

⁸ BPS, "Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 & 2010 dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1 (akses 16 / 6 / 2013)

⁹ Seorang Pastor Katolik Jerman pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 2018. Sewaktu tiba di Jakarta dan melawati kota-kota sepanjang Pulau Jawa, dia begitu terkejut karena Indonesia ternyata sangat maju, modern dan kaya. Di Jakarta dan Surabaya ia menjumpai gedung-gedung dan pusat-pusat perbelanjaan modern yang beberapa negara industri maju Eropa tidak sanggup memilikinya. Akan tetap begitu ia tiba di Kalimantan, ia lebih banyak menjumpai rawa-rawa dan jalan berlumpur dan di desa-desa di Flores ia menjumpai kampung gelap gulita malam hari tanpa listrik dan jalan-jalan desa yang tampaknya seperti jalan untuk kerbau.

¹⁰MCMILLAN Joanna, "Reformasi [Reformation] and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-corruption Agency Strategy Should Be Reformed to Effectively Combat Public Corruption," in *Emory International Law Review*, Vol. 25, 2011, p.590.

¹¹TRANSPARENCY International Corruption Perceptions Index 1998, dalam http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/1998 (Diakses pada 22/6/2013).

¹² Transparency International: The Global Coalition against Corruption dalam <https://archive.is/mwxEX> (diakses 27 September 2016).

¹³Transparency International: Corruption Perception Index 2019 dalam https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf (diakses 11 Maret 2020)

tidak membuat ujian her (ujian ulang) tapi harus mengikuti kuliah ulang matakuliah bersangkutan. Kualitas Indonesia dalam hal kebersihan dari korupsi publik masih seperti seorang mahasiswa yang prestasinya demikian. Ini sebuah kebodohan yang sangat memalukan.

Menurut Maria Martini, lembaga-lembaga yang diidentifikasi paling korup di Indonesia adalah kepolisian, sistem peradilan, parlemen (DPR, DPRD dan partai-partai politik, birokrasi terutama sektor pertanahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, industri pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya.¹⁴ Ada juga fenomena lain. Kalau selama Orde Baru korupsi hanya terpusat pada sekelompok elit di Jakarta – Suharto dan kroni-kroninya – maka di era reformasi ini, sejak tahun 1999 sampai sekarang, korupsi juga sudah ikut terdesentralisasi ke daerah-daerah hingga ke desa-desa.¹⁵ Korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa sangat marak. Pertikaian politik tingkat desa dalam rangka memperebutkan jawabatan kepala desa di seluruh Indonesia sangat tajam hingga berujung pada ancaman pembunuhan. Semuanya ini bukan dimotivasi oleh niat suci untuk melayani sesama tapi oleh niat setan untuk mengelola Dana Desa sekian rupa sehingga bisa menguntungkan diri sendiri dan keluarga sendiri.¹⁶

Menuju Indonesia 2045 dengan dua kunci utama persiapan SDM unggul dan penguasaan teknologi 4.0 ujung-ujungnya nanti tetap bersandar pada sumber daya alam sebagai modal dasarnya. Akan tetapi menurut saya, sekaya-kayanya sumber daya alam Indonesia, baik di atas tanah maupun di bawah laut tapi kalau sebahagian besar tetap dikorupsi oleh segelintir orang, maka cita-cita menuju Indonesia 2045 yang kuat, utuh, maju, adil dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi utopia belaka. Supaya itu tidak terjadi, korupsi publik harus diperangi sungguh-sungguh.

4. Pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela

Walaupun hingga saat ini Indonesia sudah menandatangani 10 dari 14 Instrumen Utama Hak-Hak Universal Manusia yang dikeluarkan oleh PBB, Indonesia tetap dicatat sebagai salah satu negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) paling berat di dunia. Rezim Suharto selama 32 tahun (1965-1998) penuh dengan kekejaman dan pelanggaran HAM yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.¹⁷ Baik selama Orde Baru maupun selama Orde Reformasi ini, pelaku utama pelanggaran HAM di Indonesia adalah pemerintah, aparat militer (polisi dan tentara) dan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang beroperasi di bidang eksploitasi sumber daya mineral.

¹⁴ Informasi lengkap tentang ini lihat Martini Maria, “The Causes of Corruption in Indonesia” dalam *Transparency International: The Global Coalition against Corruption*, 7th of August 2012, Number 338, pp.2-3.

¹⁵ Tentang ini bisa baca RINALDI Taufik, PURNOMO Mariniand DAMAYANTI Dewi, *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah* (Jakarta: Justice For the Poor Project, 2007).

¹⁶ Bdk Kasus Vinsen Patno, “Tokoh dan Pemuka Adat Desa Rego Meminta Polres Mabar Memeriksa PJS dan Aparat Desa Rego” online https://www.kompasiana.com/vino_jura/5ed0a07d097f362e7c1026e2/tokoh-dan-pemuka-adat-desa-rego-meminta-polres-mabar-memeriksa-pjs-dan-aparat-desa-rego (diakses 2 Juni 2020).

¹⁷ Informasi rinci, lihat Amnesty International, *Indonesia: Power and Impunity: Human Rights under the New Order*, 1 September 1994, ASA, 21/017/1994, p. 1.

Pelanggaran HAM terutama berhubungan dengan perampasan tanah (*land grabbing*) dan sumber daya alam yang terdapat di lahan-lahan warga masyarakat. Konflik Aceh, Poso, Sampit, Maluku dan Papua, sekadar menyebut beberapa sebagai contoh, semuanya berhubungan dengan masalah perampasan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dari warga masyarakat pedesaan (Hak Ekosob).¹⁸ Pembangunan destinasi wisata superpremium di Labuan Bajo Komodo di Flores Barat, misalnya, telah dibarengi masalah perampasan tanah (*landgrabbing*) oleh orang kaya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.¹⁹

5. Penyerbuan korporasi transnasional di sektor industri ekstraktif

Sejak reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, masalah terakhir yang juga mendera Indonesia adalah serbuan korporasi transnasional di sektor industri ekstraktif (pertambangan) di desa-desa di seluruh Indonesia termasuk NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil namun berpenduduk padat.²⁰ Setelah meneliti kebijakan pemerintah di bidang industri ekstraktif yang dieksekusi oleh sejumlah besar perusahaan transnasional, kita berargumentasi bahwa industri ini akan memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin.

Industri ini akan memperkaya para elite politik dan perusahaan-perusahaan transnasional yang selama ini sudah tidak ada rasa malu lagi untuk korupsi alias curi sumber-sumber ekonomi Indonesia yang sebenarnya merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia menurut UUD45 Pasal 33 dan semakin mempermiskin mayoritas warga masyarakat miskin di Indonesia. Oleh kerusakan permanen yang ditimbulkannya atas sumber-sumber hidup mereka – tanah pertanian, air minum, polusi sungai dan kepunahan hutan tropis – industri ekstraktif ini akan mempermiskin masyarakat petani pedesaan dan memperburuk proses urbanisasi.

Selain itu, industri ekstraktif ini akan memperburuk baik korupsi publik yang sudah sangat tinggi maupun frekuensi pelanggaran HAM di Indonesia. Seperti sudah ditunjukkan sebelumnya, korupsi publik dan pelanggaran HAM yang merajalela di Indonesia sebagian besar berhubungan dengan eksploitasi tak adil terhadap sumber-sumber daya alam di Indonesia yang saat ini sebagian besar berada di lahan-lahan pertanian milik warga masyarakat petani pedesaan.

Tak terhindarkan lagi, semua pelanggaran ini sekaligus merupakan pelanggaran berat terhadap falsafah Pancasila dan membuat jatidiri bangsa Indonesia yang diusungnya – *people of*

¹⁸ Untuk informasi lebih rinci, lihat UN Human Right Council, *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 [Universal Periodic Review]: Indonesia* (Geneva: UNHRC Working Group on the Universal Periodic Review, 21 May – 4 June 2012), p. 6 atau SHAH Anup, “Indonesia and Human Rights,” <http://www.globalissues.org/article/140/indonesia-and-human-rights> (diakses pada 15/7/2013) atau FRANCISCAN International & Asian Human Rights Commission, *Universal Periodic Review (UPR) of the Republic of Indonesia 13th Session (May – June 2012)*, Geneva 2011, pp. 9-10.

¹⁹ Alexander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme: Kritik Kenabian terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2021) khususnya bab 20 dengan judul “Kebangkitan Orang Miskin Lawan Mafia Tanah” hal. 297-338.

²⁰ Untuk informasi lebih rinci tentang hal ini, lihat Alex Jebadu dkk (ed.), *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2010) atau Ferdi Hasiman, *Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2014).

one God, civilized and just humanity, fraternity due to belonging to one nation, democracy and social justice for every Indonesian – semakin jauh panggang dari api alias semakin jauh dari kenyataan. Mengetahui beratnya masalah pencampakan nilai-nilai Pancasila, maka perjuangan menolak industri pertambangan dengan segala cara yang luhur merupakan sebuah perjuangan mengembalikan keluhuran Pancasila dan sebagai jalan menuju Indonesia 2045 yang kuat, utuh, maju dan adil.

d) Rezim Sistem Ekonomi Neoliberal di Balik Kemelut EKonomi dan Politik Indonesia

Barangkali tanpa disadari banyak orang, hampir semua krisis sosial ekonomi dan politik di Indonesia seperti yang dipresentasikan di atas tidak bisa dimengerti dengan baik tanpa melihat bingkai penyebabnya yang lebih luas yaitu sistem ekonomi kapitalis neoliberal atau ekonomi pasar bebas tanpa kendali yang sudah sejak lama dipaksakan kepada Indonesia.²¹

Ekonomi Pasar Bebas Alat Penjajahan Baru

Sejak Perang Dunia II berakhir hingga sekarang, perdagangan dan pasar bebas internasional telah menjadi instrumen baru dari negara-negara yang kuat secara ekonomis untuk menguasai negara-negara lain yang kekuatan politik dan ekonominya relatif lemah. Perdagangan dan pasar bebas internasional yang dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia II, yaitu pada bulan Juli tahun 1944 di Hotel Brettonwoods, Amerika Serikat, pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan pasar kapitalis (*capitalist market*) untuk berkembang secara global melampaui batas negara-negara industri maju.

Sejak akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, dunia pada dasarnya telah mulai diperintah dan dikuasai secara politis dan ekonomis oleh lembaga keuangan internasional yang dalam kenyataannya dikontrol oleh sejumlah kecil negara Barat. Ketiga lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 di Brettonwoods, Amerika Serikat – IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO – merancang dan menjalankan tata ekonomi secara baru untuk seluruh dunia. Akan tetapi dalam rancangan dan pengelolaan IMF dan Bank Dunia, beberapa negara adidaya terutama Amerika Serikat dan Inggris sudah sejak awal berdirinya lembaga-lembaga keuangan ini telah memegang peranan yang sangat dominan dan hal ini terjadi bukan karena dilatarbelakangi motivasi untuk memajukan dunia tapi karena mereka melihat lembaga

²¹ Sistem Ekonomi Neoliberal merupakan sebuah tema besar dan sangat kompleks yang tidak bisa diuraikan dalam satu dua halaman saja di sini. Supaya Anda bisa mendapat informasi cukup memadai tentang hal ini, baca Awalil Risky & Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia* (Jakarta: E-Publishing Company, 2008); tentang bagaimana negara-negara Barat berusaha menguasai kekayaan alam Indonesia sejak sesudah Perang Dunia II tahun 1945 dengan menggulingkan Presiden Sukarno dari kekuasaannya, dengan merancang pemberontakan pemberontak di luar Pulau Jawa seperti Permesta hingga dikudeta secara misterius pada tgl 30 September 1965 dan bagaimana agen rahasia Amerika Serikat CIA terlibat di dalamnya, Anda mesti baca John Roosa, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia* (Wisconsin, USA: The University of Wisconsin Press, 2006); dan bagaimana Sukarno berjuang mempertahankan kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi perusahaan asing dan membangun ekonomi Indonesia tanpa bersandar pada pinjaman penuh jebakan dari IMF dan Bank Dunia, Anda mesti baca Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence* (Ithaca USA and London UK: Cornell University Press, 1976), Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959-1965* (Jakarta & Singapor: Equinox Publishing, 2006) dan Malcolm H. Murfett (ed.), *Cold War Southeast Asia* (Singapore: Marshall Cavendish, 2012).

keuangan ini sebagai instrumen baru untuk kepentingan ekspansi ekonomi mereka pasca Perang Dunia II.²²

Negara Miskin Dijebak dengan Utang

Untuk mencapai maksud ini, maka negara-negara industri sejak Perang Dunia Kedua selesai pada tahun 1945 mulai menjebak negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk meminjam dana pada Bank Dunia dan IMF. Pinjaman besar-besaran diberikan pada akhir tahun 1960-an hingga tahun 1970-an dengan dalil dalam rangka biaya pembangunan.²³ Lalu ketika negara debitor (penerima pinjaman) ini, termasuk Indonesia, mulai tak sanggup membayar utang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia pada tahun 1980-an (khusus negara-negara Amerika Latin) dan pertengahan tahun 1990-an (khusus negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang dilanda krisis ekonomi dan berbuntut dengan lengsernya Suharto tahun 1998), maka negara-negara kreditor/industri via IMF dan Bank Dunia mulai mendikte dan mengatur ekonomi negara-negara debitor dengan memaksa mereka menerima kebijakan ekonomi pasar bebas tanpa kendali atau kapitalisme neoliberal.

Kebijakan-kebijakan ekonomi pasar bebas alias kapitalisme neoliberal ini dikenal dengan nama *Structural Adjustment Programs* (SAPs), yaitu seperangkat kebijakan ekonomi dari IMF yang bertujuan untuk menata kembali ekonomi negara-negara miskin yang dibebani utang pada IMF dan Bank Dunia agar ekonomi mereka lebih produktif sehingga keuntungannya bisa dipakai untuk membayar utang luar negeri termasuk utang yang dipinjam pada IMF dan Bank Dunia pada tahun 1960-an hingga 1970-an.

SAPs itu antara lain meliputi pemotongan belanja publik/pembangunan (*reducing public expenditures*), reformasi pajak (*tax reform*), liberalisasi pasar ekonomi (*trade liberalization*) dan ekonomi yang kompetitif (*competitive economy*).²⁴ Melalui kebijakan ini, negara-negara miskin yang berhutang akan bisa mendapat keringanan pembayaran bunga utang lama atau bisa mendapat pinjaman baru lagi dari IMF atau Bank Dunia hanya kalau mereka bersedia menghemat pengeluaran belanja publik, membuka ekonomi negara mereka seluas-luasnya bagi perusahaan asing dan menyerahkan aset-aset publik, yang biasanya sangat vital untuk kepentingan rakyat, untuk dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta termasuk perusahaan swasta dari negara asing.

e) Dampak Sistem Ekonomi Pasar Bebas bagi Indonesia

Credo Neoliberalisme

²²Richard Peet, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO* (London and New York: Zed Books, 2010), p. 41.

²³Tentang masalah utang luar negeri sebagai jebakan negara-negara industri terhadap negara berkembang termasuk Indonesia, bisa baca Eric Toussain and Damien Millet, *Debt, the IMF dan the World Bank: Sixty Question Sixty Answers* (New York: Monthly Press, 2010) terjemahan Indonesianya Eric Tossaint, *Mafia Bank Dunia dan IMF: Alat Penjajahan Baru Negara Industri Terhadap Negara-Negara Berkembang Sejak Akhir Perang Dunia Kedua*, penerjemah Alexander Jebadu (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), Eric Toussain, *The World Bank: A Critical Primer* (London: Pluto Press, 2008).

²⁴Richard Peet, *Ibid.*, pp. 14-15.

Inti *credo* rezim ekonomi neoliberal, yang dirancang negara-negara industri maju dan yang dipaksakan kepada negara-negara berkembang melalui SAPs oleh IMF dan Bank Dunia, berkisar pada empat hal pokok ini: pertumbuhan ekonomi tanpa batas (*exponential economic growth*), pasar harus bebas (*free markets*), liberalisasi ekonomi (*economic globalization*) dan privatisasi ekonomi (*economic privatization*).

Dalam lingkaran ideologi ekonomi neoliberal ini, pertumbuhan ekonomi sebuah negara, yang lazimnya diukur dengan Produksi Nasional Bruto (PNB), dilihat sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran hidup manusia (*a path to human progress*). Lalu untuk mencapai hal ini, maka pasar dan perdagangan antara bangsa-bangsa harus dibuka seluas-luasnya tanpa dirintangi oleh pelbagai macam regulasi seperti bea cukai terhadap barang impor (*free markets* dan *economic liberalization* atau *economic globalization*). Negara harus membuka diri seluas-luasnya bagi perusahaan asing. Semua sektor ekonomi vital setiap negara yang menguasai hidup orang banyak yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan negara (BUMN) harus diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta asing (*economic privatization*) untuk menjamin efisiensi dan kompetisi usaha ekonomi seluas-luasnya.²⁵

BUMN sepeperti Telkom, PLN atau Bank-Bank milik negara, misalnya harus dijual kepada perusahaan swasta baik perusahaan swasta dalam negeri maupun perusahaan asing, eksploitasi kekayaan alam seperti tambang diserahkan kepada perusahaan swasta dalam negeri atau perusahaan asing, lalu perusahaan asing juga diisinkan untuk membeli tanah dalam negeri untuk membuka usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Pemberian isinan kepada perusahaan asing untuk membuka usaha ekonomi di dalam negeri ini yang disebut dengan Penanaman Modal Langsung (*Foreign Direct Investment*), yang untuk negara Indonesia semua kebijakan ekonomi neoliberal ini bertentangan dengan UUD45 Pasal 33.

Cita-Cita Keadilan Sosial Semakin Jauh Panggang dari Api

Apakah misi ekonomi neoliberal melalui SAPs telah mencapai tujuan yang diusungnya, yakni meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan kemakmuran negara-negara miskin yang sedang berkembang di seluruh dunia khususnya di belahan bumi Selatan seperti Indonesia? Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa hal itu masih jauh panggang dari api. Program restrukturisasi ekonomi (*Structural Adjustment Programs*) yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal melalui IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara miskin di seluruh dunia menuai banyak kritik karena dampak negatif yang ditimbulkannya seperti:

- 1) penghapusan subsidi kebutuhan pokok masyarakat, 2) pengurangan anggaran APBN untuk sektor-sektor sosial (seperti dana bansos, dana pendidikan, dana bencana alam), 3) penurunan nilai mata uang (devaluasi), 3) pembukaan pasar bebas dengan menghapus bea cukai import, 4) liberalisasi pasar modal, 5) eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dan 5) pencaplokan kedaulatan negara alias menghancurkan

²⁵ David Korten C., *When Corporations Rule the World* (San Francisco, CA: Berrett-Koeler Publisher Inc., 2009), pp. 72-73.

demokrasi – dan untuk Indonesia semua hal ini sama dengan menghancurkan nilai-nilai Pancasila. Cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang ber-Tuhan, beradab, satu saudara, kedaulatan tertinggi di tangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sebuah mimpi nasional yang semakin jauh dari kenyataan.²⁶

f) Menuju 2045 Indonesia Mesti Reorientasi Pembangunan

Neoliberalisme Musuh Pancasila

Mengingat kebijakan ekonomi pasar bebas tanpa kendali merupakan sebuah agenda politik ekonomi dari negara-negara industri dengan mesinnya IMF, Bank Dunia dan WTO dan dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan transnasional milik mereka supaya mereka dengan bebas keluar-masuk untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara-negara miskin, maka Sistem Ekonomi Pasar Bebas bukan merupakan sebuah ekonomi yang disambut dengan sukacita. Sukarno selama 32 tahun kepemimpinannya telah mengetahuinya sebagai sebuah penjajahan dalam bentuk baru (bdk neokolim) via ekonomi pasar bebas (*free market economy*). Pengeritik-pengeritik modern seperti Richard Peet, Susan George, Joseph Stiglitz dan Eric Toussaint, sekadar hanya untuk menyebut beberapa contoh, juga melabel sistem ekonomi pasar bebas ini sebagai sebuah neokolonialisme.

Dengan melihat isi kebijakan ekonomi neoliberal seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya, ekonomi pasar bebas dengan sendiri bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Sistem ekonomi kapitalis neoliberal akan membuat mimpi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang makmur, adil dan sejahtera pada tahun 2045 seperti yang diusung Pancasila dan UUD45 akan semakin jauh dari kenyataan. Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, kecuali Jepang dan *the four tigers* (Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan), serta Afrika dan Amerika Latin tampaknya tidak akan bisa berkembang secara fisik seperti yang sudah dicapai bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara.

Sekalipun seluruh sisa-sisa sumber daya alam di desa-desa di seluruh Indonesia dieksploitasi hingga habis dan hasilnya diekspor untuk melanjutkan pembangunan modern di negara-negara industri, daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia tidak akan berubah menjadi kota metropolitan seperti Paris, London, Frankfurt, Milan, New York atau Hong Kong, Tokyo dan Makau, yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan stasiun kereta api cepat antarkota.

Kejar Kemajuan Negara Industri Kejar Mitos

Mimpi Indonesia pada hari ulang tahun ke-100 pada tahun 2045 akan maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa tidak akan terjadi dan akan tetap tinggal sebagai mitos.²⁷ Sebaliknya,

²⁶ Untuk ulasan agak rinci tentang dampak-dampak negatif dari kebijakan ekonomi pasar bebas yang dipaksakan negara-negara industri via IMF dan Bank Dunia ini, bisa baca Alexander Jebadu “Relasi Pertambangan, Kekejaman Neoliberalisme dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi” dalam Richard Rahmat, *Gereja Itu Politis: Dari Flores untuk Indonesia* (Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2013), pp. 159-196.

²⁷ Menurut Oswaldo de Rivero, mantan diplomat Peru untuk PBB, mengatakan bahwa propaganda pembangunan negara berkembang di Dunia III supaya mereka harus mengejar pembangunan dengan kemajuan Eropa dan Amerika

orang desa di seluruh Indonesia justru akan menjadi lebih miskin dan hidup lebih sulit. Mereka tetap akan pergi dan pulang dari kebun berjalan kaki sambil mengusung kayu api di kepala. Pada musim paceklik, sebagian besar dari mereka akan tetap makan biji asam seperti telah terjadi di beberapa tempat di NTT atau umbi beracun di hutan. Namun biji asam dan ubi-ubi hutan ini pun akan tetap ada kalau perusahaan asing tidak menggusur semua pohon asam dan huta yang masih sisa.

Propaganda kemakmuran melalui pertumbuhan ekonomi oleh rezim kapitalisme neoliberal yang dieksekusi perusahaan transnasional merupakan sebuah ilusi belaka. Kemakmuran sebagai akibat dari teori *trickle-down effect* dari para pengusung sistem ekonomi neoliberal hanya merupakan sebuah akal-akalan. Karena fakta menunjukkan bahwa selama sekitar 40 tahun dunia berada di bawah kekuasaan ekonomi neoliberal sejak tahun 1980-an, negara-negara berkembang yang dibebani utang termasuk Indonesia malahan semakin miskin, sementara negara-negara industri pengusung sistem ekonomi neoliberal ini semakin kaya.

Daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia tidak akan pernah bisa maju secara fisik seperti Eropa dan Amerika Utara atau Jepang. Alasannya jelas. Selain karena usaha pencapaian kemajuan pembangunan fisik dengan standar yang telah diraih bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara membutuhkan waktu yang sangat lama, juga karena sumber-sumber dasar kekayaan planet bumi secara keseluruhan sudah mulai habis.

Minyak bumi sebagai energi utama pembangunan manusia pada abad 20 dan awal abad 21 ini akan habis dalam waktu tak lama lagi. Karena itu, tindakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan menerbitkan puluhan ribu Isin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menambang pelbagai jenis mineral di daerah-daerah pedesaan di seluruh Indonesia, dengan menghancurkan sawah, ladang dan kebun para petani desa serta hutan lindung di wilayah mereka merupakan sebuah pilihan arah pembangunan yang sangat tidak tepat dan karena itu harus dipertimbangkan kembali. Bersama dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, pemerintah Indonesia mesti sadar bahwa model ekonomi yang dipaksakan oleh rezim kapitalisme neoliberal, yang saat ini sedang dipimpin oleh negara-negara industri G7/8 melalui IMF, Bank Dunia dan WTO serta dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan transnasional merupakan model pembangunan yang tidak tepat.

Pembangunan hidup dan peradaban manusia tidak bisa ditempuh dengan cara mengeksploitasi alam secara berlebihan dan dengan menggunakan sumber-sumber alam secara berlebihan untuk menyokong gaya hidup konsumtif. Tata ekonomi dunia baru (*New World Economy Order*) yang dirancang di Bretton Woods pada tahun 1944 mesti direvisi kembali secara total. Pertumbuhan ekonomi yang dibingkai pasar dan perdagangan bebas tanpa kendali, yang mendorong eksploitasi alam secara berlebihan dan mendorong budaya hidup konsumtif

Utara sebagai patokannya merupakan sebuah mitos alias tidak akan bisa menjadi sebuah kenyataan dengan beberapa alasan: 1) Untuk mencapai kemajuan seperti yang telah di raih Eropa dan Amerika Utara dibutuhkan waktu yang panjang (Amerika, misalnya, butuh 500 tahun sejak migrant pertama tiba di sana pada tahun 1500); 2) Untuk mencapai kemajuan dengan standar Eropa dan Amerika Utara dibutuhkan biaya yang tidak sedikit; dan 3) sebahagian besar kekayaan alam planet bumi sudah habis dieksploitasi. Informasi lebih lanjut, lihat Oswaldo de Rivera, *The Myth of Development: The Non-Viable Economies of the 21st Century* (London dan New York: Zed Books, 2001) .

mesti ditinggalkan. Semua bangsa manusia mesti belajar untuk membangun hidup dan peradabannya selaras dengan kemampuan alam untuk menopang semua unsur kehidupan.

Indonesia Harus Reorientasi Pembangunan

Indonesia mesti belajar kembali apa artinya pembangunan manusia (*human progress*) dan bagaimana mereka harus menggapainya secara berkelanjutan (*sustainable*). Tim Jakson ingatkan bahwa kemakmuran sejumlah kecil orang selama ini sesungguhnya diraih dengan menghancurkan alam,²⁸ dan negara-negara berkembang lainnya termasuk Indonesia seharusnya tidak mengikuti jalan keliru yang sama.

Tidak semua peradaban yang dicapai bangsa Barat selama ini, misalnya kemajuan fisik dalam bentuk gedung-gedung dan apartemen yang tinggi menggapai langit (*skyscrapers*), jalan raya besar dan rel-rel kereta api yang tembus gunung dan bukit (*tunnel*), budaya hiburan yang kolosal seperti balap mobil dan peragaan busana kecantikan (*beauty show*), dapat menjadi model untuk dikejar.

Menurut UUD 45 dan Falsafah Pancasila, pembangunan ekonomi dan peradaban Indonesia bersifat holistik – menyeluruh – yang meliputi badan dan jiwa, rohani dan jasmani. Ia tidak hanya diukur oleh pembangunan fisik tapi juga pembangunan spiritual. Karena manusia pada dasarnya merupakan badan yang menjiwa (*inspired body*) dan sekaligus jiwa yang membadan (*embodied spirit*). Selama manusia hidup, jiwa dan badan begitu satu dan tidak bisa dipisahkan. Dan karena itu pembangunan jasmani dan rohani untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kodratnya demikian mesti berjalan bersamaan secara seimbang.

Pembangunan rohani yang umumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga agama, entah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha atau Aliran Kepercayaan, mesti dihargai dan didukung oleh pemerintah/negara. Kalau kita yakin bahwa pembangunan spiritual sangat vital bagi kepentingan bangsa seturut Pancasila dan UUD45, maka pembangunan rohani yang dijalankan oleh lembaga-lembaga agama seharusnya dianggarkan juga di dalam APBN/ APBD.

Pembangunan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur (*Sila Kelima*) bersumber pada pengakuan akan Tuhan (*Sila Pertama*) sebagai asal dan tujuan dari segala sesuatu termasuk bumi dan bangsa Indonesia dan didasarkan pada visi kemanusiaan yang adil dan beradab (*Sila Kedua*). Untuk mencapai tujuan ini bangsa Indonesia mesti bersatu sebagai satu bangsa yang bersaudara (*Sila Ketiga*) apa pun suku, agama, budaya, ras atau daerahnya dan hidup penuh kasih dalam wadah demokrasi (*Sila Keempat*) di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, didelegasikan kepada pemerintah untuk dijalankan atas nama rakyat dan bertujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia (*Sila Kelima*). Hingga 19 Januari 2020 total utang luar negeri Indonesia adalah Rp 4.817,5 triliun (naik dari Rp 1.937 triliun tahun 2012) atau Rp 4. 817.500.000.000.000.²⁹

²⁸ Tim Jackson, *Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet* (London: Earthscan, 2011), p. 15.

²⁹ Diemas Kresna Duta, “Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp4.234 triliun” dalam *CNN Indonesia* online <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160119102118-78-105232/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp4234-triliun/> (diakses 27 September 2016).

Kalau utang ini dibagi kepada 270.000.000 jiwa penduduk Indonesia, maka setiap warga Indonesia, termasuk yang baru lahir, dibebani utang luar negeri sebesar Rp 18.000.000. Utang ini pasti termasuk utang yang dipinjam dari rezim ekonomi neoliberal melalui IMF dan Bank Dunia pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Bersama dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia seharusnya berani menuntut penghapusan utang ini karena pinjaman tahun-tahun ini dimotivasi politik terselubung dari negara-negara kreditor atau pemegang saham terbesar pada kedua lembaga keuangan di Washington, DC, Amerika Serikat kala itu.

Hapus Utang Luar Negeri Tidak Sah

Lebih dari itu, pinjaman ini tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia karena telah disalahgunakan rezim Orde Baru. Ini jelas merupakan *odious debt*. Ini utang tidak sah, tidak *fair*, dan tidak bermoral. Bangsa Indonesia kini berhak menuntut untuk menghapusnya. Hanya kalau Indonesia menolak membayar *odious debts*, Indonesia akan bebas juga dari resep SAPs atau apa pun namanya yang baru seperti PRSPs (*Poverty Reduction Strategy Papers*) yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal.

Selain itu, kembalikan dan pertahankan kedaulatan ekonomi menurut UUD45 Pasal 33. Aset-aset vital ekonomi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti perusahaan air minum, listrik, pelayanan pos, jasa kereta api, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam, pendidikan dan kesehatan tidak dapat dibenarkan untuk dikelola oleh perusahaan swasta, baik perusahaan swasta dalam negeri maupun perusahaan swasta internasional, melainkan mesti dikuasai dan dikelola oleh negara (melalui BUMN) atas nama seluruh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat juga. Alasan klasik bahwa BUMN sering tidak efisien dan selalu merugi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjual aset-aset vital negara kepada perusahaan swasta, tetapi dengan memperbaiki sistem, mekanisme kerja serta mental petugas yang menyelenggarakannya.

Indonesia Bisa Hidup dan Maju dari Sumber Pajak

Demi kedaulatan ekonomi, Indonesia – bersama bangsa-bangsa lain – mesti berjuang memberantas *tax havens* (tempat rahasia persembunyian uang di luar negeri), kontrol aliran modal dari dalam dan keluar negeri dan berantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Untuk masa depan, Indonesia yang sangat subur karena pupuk alam dari barisan gunung api dari Sabang sampai Merauke bisa membangun atas dasar kekuatan sendiri dengan berbasis pada pertanian, peternakan, dan pengelolaan maritim seperti yang sudah dicita-citakan oleh Presiden Sukarno.

Bila uang rakyat yang dikumpul dari pelbagai macam pajak dari keringat 270.000.000 jiwa penduduk Indonesia (PPH, PPn, PPnBM, PBB, BPHTB, Meterai, dan lain-lain) dikelola dengan baik, tidak dikorupsi para petugas pajak pada waktu proses pengumpulannya dari tangan rakyat dan tidak dikorupsi lagi oleh pemerintah pada waktu pengalokasiannya via APBN/APBD, Indonesia sebenarnya bisa hidup dan maju hanya dari dan oleh sumber pajak.

Jangan Membangun dengan Utang

Indonesia seharusnya tidak perlu meminjam pada lembaga keuangan luar negeri yang didominasi oleh negara-negara industri sebagai pengusung sistem ekonomi neoliberal yang opresif, eksploitatif, dan konsumeristis. Kalaupun Indonesia sekarang dan di masa datang terpaksa harus meminjam pada lembaga keuangan luar negeri, maka pinjaman itu hanya bisa dibuat setelah mendapat persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Ia terlebih dahulu harus terbuka untuk didiskusikan di dalam sidang DPR dan media massa. Alasannya sangat mendasar. Setiap pinjaman luar negeri oleh pemerintah dibuat atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan akan dibayar kembali oleh pajak rakyat. Hanya dengan ini Pancasila bisa ditegakkan kembali dan mimpi kemakmuran yang dicita-citakan bangsa Indonesia Menuju 2045 bukan merupakan sebuah mitos tapi sebuah kemungkinan yang bisa menjadi kenyataan.

g) Mesti Revolusi Kembali Ke Sistem Ekonomi Pancasila dan Tolak Neoliberalisme

Didasarkan pada apa yang dipresentasikan di atas, bersama Profesor Moebyarto dan rekan-rekan dosen dari Pusat Studi Ekonomi Pancasila dari UGM, saya menyerukan seluruh warga Indonesia dan pemerintah Indonesia supaya segera melakukan revolusi untuk kembali ke sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi Pancasila seperti termeterai dalam UUD45 Pasal 33 dan menolak sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang dipaksakan negara-negara industri melalui lembaga ekonomi dunia: Bank Dunia, IMF dan WTO. Dengan revolusi kembali ke sistem ekonomi Pancasila, kita menyelamatkan ideologi Pancasila dan menyelamatkan ideologi Pancasila sama dengan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia.

NKRI dan Pancasila tidak bisa menjadi dua hal yang sudah harga mati tanpa keadilan sosial ekonomi. Tidak bisa kita katakan bahwa Pancasila adalah harga mati, sementara 50% sumber daya alam Indonesia dari Sabang sampai Marauke dikuasai oleh 1% orang kaya di Indonesia. Menuju Indonesia 2045 yang kuat dan utuh tidak bisa tanpa keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua desain Indonesia seperti yang dipresentasikan buku *Indonesia Menuju 2045* akan membawa kesejahteraan bagi mayoritas rakyat Indonesia hanya kalau bangsa ini terlebih dahulu berevolusi untuk kembali ke sistem ekonomi demokrasi alias sistem ekonomi Pancasila seperti termeterai dalam UUD45 Pasal 33 dan tolak neoliberalisme alias sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali. Jika tidak, semua desain Indoneisan Menuju 2014 akan menjadi utopia. Industri 4.0 tidak akan membawa berkat bagi mayoritas bangsa Indonesia tapi hanya menguntuhkan segelintir orang yang sudah kaya di Indonesia maupun orang asing melalui perusahaan-perusahaan transnational milik mereka. @